

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Erna dan Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Handoyo, Hestu Cipto, 1998, *Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Tinjauan Historis Yuridis)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Santoso, Urip, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

-----, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria S., 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 jo. Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Januari 1956.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7.

C. Skripsi / Tesis / Jurnal

Ari, Awesti Tunggo, “Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2006.

Ismail, Nurhasan, “Pilihan Status Hukum Keraton dan Hak Atas Tanah sebagai Unsur Keistimewaan DIY”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus, September, 2007.

Purwanti, Endang, “Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas Tanah Rumah Sangat Sederhana (RSS) atau Rumah Sederhana (RS) pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Sukisno, Djoko, “Tanah Kasultanan Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Adat”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus, September, 2007.

Sumardjono, Maria SW., “Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum Tanah Kraton dalam Lingkup Hukum Tanah Nasional”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Edisi Khusus, September, 2007.

Sutoyo, Anang, “Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal di Kabupaten Sukoharjo”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.

Widiyanti, “Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2006.

Yulianti, “Tinjauan Yuridis terhadap Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Studi Kasus di Kota Makassar)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

D. Situs

Lamudi, 2016, *Perbedaan Hak Guna Bangunan dengan Hak Milik*, <http://www.lamudi.co.id/journal/perbedaan-hak-guna-bangunan-dengan-hak-milik/>, diakses tanggal 15-03-2017.



Tunardy, Wibowo. 2013. *Hak Guna Bangunan*, <http://www.jurnalhukum.com/hak-guna-bangunan/>. Diakses tanggal 16-03-2017.

Tanjung, Asriman Akhiruddin. 2015. *Cara Meningkatkan Status Tanah HAK GUNA BANGUNAN (HGB) menjadi SHM*, [http://asriman.com/cara-meningkatkan-Hak Guna Bangunan \(HGB\)-menjadi-shm/](http://asriman.com/cara-meningkatkan-Hak-Guna-Bangunan-(HGB)-menjadi-shm/). Diakses tanggal 15-03-2017.